

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor keuangan merupakan sektor yang paling banyak diregulasi karena dianggap sebagai sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. Yesi Hendrian Suparto et al (2018). Didalam lembaga keuangan sektor perbankan merupakan lembaga yang berpengaruh terhadap dinamika perekonomian dikarenakan lembaga keuangan bank mempunyai tugas sebagai agen pembangunan (*agen of development*) terutama bank-bank yang dimiliki pemerintah. Hal ini didasarkan pada kegiatan bank yang mempunyai kemampuan dalam menghimpun keuangan masyarakat yang kelebihan dana, kemudian dana yang berhasil dihimpun dapat disalurkan kembali dalam bentuk kredit, pemberian kredit inilah yang nantinya mampu dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dimana penyaluran kredit tersebut dapat dialokasikan secara efektif terhadap sektor produktif yang membutuhkan modal dengan didapatkannya pembiayaan tersebut keperluan kegiatan usaha dalam menunjang bisnis akan berlanjut sehingga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan sektor perbankan merupakan hal yang paling penting bagi kelangsungan suatu usaha keterkaitan antara usaha masyarakat dengan lembaga keuangan bank merupakan kebutuhan bagi kedua pihak sebab permasalahan yang sering di alami oleh pengusaha adalah kekurangan modal,

dari sinilah keberadaan perbankan sangat di butuhkan oleh pengusaha yang memiliki modal minim sehingga dengan adanya kredit yang di berikan oleh bank dapat digunakan untuk keperluan berbagai kegiatan usaha yang menyangkut proses produksi maupun ekspansi, untuk memenuhi proses produksi dan ekspansi suatu usaha kredit yang di berikan oleh perbankan sangat dibutuhkan karena sebagai permodalan dalam menjalankan berbagai kegiatan bisnis.

Berdasarkan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan (Pasal 1 Ayat 11) menyatakan bahwa “kredit” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”, dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa sebagai pihak debitur yang meminjam berupa kredit dari lembaga perbankan berkewajiban untuk melunasi pinjamannya dengan jangka waktu dan sesuai dengan bunga yang telah disepakati. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu terkadang pihak debitur mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban pinjaman sehingga akan menyebabkan pelunasan pinjaman akan terlambat dan dapat memicu menimbulkan kredit bermasalah, bahkan beberapa kalangan pihak debitur melalaikan kewajibanya tersebut dengan maksud tujuan lain yang dimana dapat dikaitkan dengan teori perilaku *moral hazard* dari sisi debitur.

Menurut Ervinna Chandra Kusuma et al (2016). Aktivitas penyaluran kredit perbankan memang memiliki banyak resiko terkait penyaluran kredit, namun bank harus tetap menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi. Pemberian kredit oleh bank merupakan jasa yang paling dominan dalam menghasilkan keuntungan, akan tetapi resiko yang dihadapi dari penyaluran kredit akan berpengaruh terhadap kesehatan dan kegiatan usaha bank apabila kredit bermasalah yang dialami cukup besar, hal ini perlu kebijakan strategis dari pihak internal bank terutama mengenai manajemen resiko. Oleh karena itu perlu upaya monitoring yang ketat dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam penyaluran kreditnya agar dapat meminimalkan sebisa mungkin terjadinya kenaikan kredit bermasalah walaupun terkadang berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan kredit bermasalah agar memperoleh laba seperti yang diharapkan. Namun memang pada dasarnya penyaluran kredit memiliki syarat akan resiko, bahkan hampir seluruh lembaga keuangan bank yang menyalurkan dananya berupa kredit, baik bank konvensional maupun bank syariah mengalami adanya resiko kredit rumitnya penjelasan mengenai kredit bermasalah menjadikan sebuah tantangan bagi pihak perbankan

Adanya resiko akan penyaluran kredit tertuang dalam peraturan Bank Indonesia No.15/2/PBI/2013 telah menetapkan bahwa salah satu kriteria bank yang memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya adalah bank dengan rasio kredit diatas 5% secara neto . *Non performing loan* atau biasa di singkat NPL merupakan rasio yang dapat di

gunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat kredit bermasalah yang dialami oleh bank umum konvensional, sehingga tingginya rasio NPL mencerminkan besarnya kredit bermasalah begitupun sebaliknya apabila rasio NPL rendah maka kredit bermasalah yang dialami oleh bank juga tergolong rendah, sehubungan dengan itu rasio NPL juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank dengan kata lain apabila rasio NPL tergolong rendah dapat diasumsikan bahwa kinerja sebuah bank tersebut dalam manajemen resiko kredit perusahaan sangat baik begitupun sebaliknya.

Berfokus pada bank BUMN ada peristiwa unik yang terjadi dengan kondisi kredit bermasalah, merangkum dari Kontan.co.id, tiga dari empat bank BUMN mencatatkan perbaikan rasio kredit macet namun berbeda dengan PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Bank tersebut justru mengalami kenaikan kredit bermasalah dimana NPL *gross* kuartal I 2019 tercatat 2,92%, naik dari 2,78% di triwulan pertama tahun lalu. Hal ini berbeda dengan tiga bank BUMN lain. PT Bank Negara Indonesia Tbk misalnya mampu menjaga rasio NPL *gross* di level 1,9% di tengah pertumbuhan kredit. Rasio kredit bermasalah itu turun dari 2,3% di kuartal I tahun 2018. Sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, juga berhasil mencatatkan perbaikan rasio kredit bermasalah di kuartal I NPL *gross* BRI turun dari 2,39% di triwulan pertama tahun lalu menjadi 2,31%. Sementara PT Bank Mandiri Tbk mencatatkan rasio NPL *gross* sebesar 2,68%, turun dari 3,32% di triwulan I 2018.

Kredit bermasalah pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk di triwulan II juga mengalami kenaikan yang signifikan, di kuartal II 2019 rasio NPL *gross* ada di level 3,32% meningkat dari 2,78% di kuartal yang sama tahun sebelumnya posisi tersebut juga mencapai level tertinggi sejak tahun 2016 silam, sementara itu profitabilitas *Net Interest Margin* (NIM) di triwulan II terperosok jadi 3.53% dibanding triwulan yang sama tahun lalu 4.17%. Sepanjang semester I 2019 PT. Bank Tabungan Negara Tbk mencatatkan laba bersih sebesar Rp 1,3 triliun angka tersebut turun sebesar 8,4% dibanding periode yang sama tahun lalu senilai Rp 1,42 triliun, laba bersih turun tersebut dikarenakan CKPN (pencadangan) dibentuk lebih besar untuk memenuhi ketentuan PSAK 71 ujar Maryono, Direktur Utama Bank BTN di acara paparan kinerja keuangan semester I 2019, di Jakarta CNBCIndonesia.com.

Terkait permasalahan kredit yang dialami PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Bank BTN selain sebagai bank agen pembangunan bank BTN juga mempunyai tugas khusus sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan perumahan yang dimana kredit kepemilikan rumah (KPR) merupakan jenis kredit yang memiliki resiko yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan dikeluarnya surat edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP pada 15 maret 2012 kepada bank umum yang menyebutkan bahwa sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) serta mengingat pertumbuhan KPR dan KKB yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan berbagai risiko maka bank perlu meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran KPR dan KKB, selain itu

bahwa pertumbuhan KPR yang terlalu tinggi juga dapat mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (*bubble*) sehingga dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank-bank dengan eksposur kredit properti yang besar.

Berbicara mengenai surat edaran tersebut mengingatkan kembali kepada terjadinya krisis global tahun 2008 yang dikenal dengan sebutan subprime mortgage. Menurut *Outlook Ekonomi Indonesia 2009-2014* edisi Januari 2009, *subprime mortgage* merupakan istilah untuk kredit perumahan (*mortgage*) yang diberikan kepada debitur dengan sejarah kredit yang buruk atau belum memiliki sejarah kredit sama sekali, sehingga digolongkan sebagai kredit yang berisiko tinggi. Penyaluran *subprime mortgage* di AS mengalami peningkatan pesat mulai di bawah USD200 miliar pada tahun 2002 hingga menjadi sekitar USD500 miliar pada 2005. Kesalahan dalam pengelolaannya, menyebabkan *subprime mortgage* menjadi awal bencana krisis global yang melanda Amerika Serikat dan berdampak pada negara-negara Eropa. Anin Diyanti dan Endang Tri Widyarti (2012).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai terjadinya kredit bermasalah banyak faktor yang turut andil dalam menaikkan dan menurunkan tingkat kredit bermasalah yang dihadapi oleh perbankan, menurut Ekanayake dan Azeez (2017). Mengungkapkan bahwa terjadinya kredit bermasalah bisa dikaitkan dengan kondisi makroekonomi dan spesifik bank, berkenaan dengan stabilitas makroekonomi tingkat nasional beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan ekonomi dan inflasi

yang relatif berfluktuatif dimana turut mempengaruhi kenaikan kredit bermasalah pada beberapa bank, sehingga perlu mempertimbangkan danantisipasi bagi pihak perbankan dalam menyalurkan kreditnya dengan melihat keadaan makroekonomi yang memungkinkan berpengaruh terhadap naik turunnya kredit bermasalah.

Indikator yang tak kalah penting dalam mempengaruhi kredit bermasalah adalah dari sisi spesifik bank, banyak literatur mengungkapkan bahwa kinerja perbankan yang tercermin dalam bentuk rasio keuangan memberikan pengaruh terhadap naik turunnya kredit bermasalah. Hal ini didasarkan karena kinerja perbankan yang tercerming dari rasio keuangan merupakan bentuk bagaimana kegiatan suatu bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan demikian pihak perbankan harus mengupayakan berbagai rasio keuangan dalam angka yang ideal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia agar tidak terjadi eksposur yang berpotensi menaikkan resiko kredit bermasalah yang dihadapi.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk, dikarenakan atas beberapa pertimbangan diantaranya karena PT. Bank Tabungan Negara Tbk merupakan bank milik pemerintah yang mempunyai tugas sebagai agen pembangunan, serta mengetahui adanya fenomena naiknya non performing loan yang mengakibatkan penurunan laba dan juga mengingat bahwa kredit pemilikan rumah (KPR) memiliki resiko yang tinggi. Hal inilah yang menjadikan alasan penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk.

Dengan adanya permasalahan kredit bermasalah yang mengakibatkan penurunan laba, maka perlu diketahui beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kredit bermasalah, dengan berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Loan* Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ?
2. Apakah *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ?
3. Apakah Biaya Pendapatan terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ?
4. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perlu diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ?
2. Untuk mengetahui pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ?
3. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Pendapatan terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ?
4. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah serta tujuan yang ingin dicapai, maka manfaat yang diharapkan dari dilaksanakannya penelitian ini antara lain :

- a. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- b. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Loan* pada perbankan.
- c. Bagi pihak lain, Penelitian ini dapat dijadikan masukan khususnya bagi pihak-pihak bank dalam menjaga *Non Performing Loan* dan dapat menjadi

rujukan yang mengarah pada proses penciptaan iklim kondusif dalam keuangan perbankan.